



Lima Persen KIP Salah Sasaran

JOGJA, BERNAS -- Program Indonesia Pintar (PIP) yang digulirkan pemerintah tidak berjalan lancar. PIP yang diberikan kepada pelajar yang tidak mampu secara ekonomi dengan tujuan agar tidak putus sekolah dan rawan putus sekolah, namun ternyata sekitar 5

persen dari sekitar 11 juta siswa penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam program itu salah sasaran.

"Kartunya ditarik karena salah sasaran. Dari data yang terekam memang ada sekitar lima persen dari sebelas juta penerima yang salah sasaran

di seluruh Indonesia," ungkap Hamid Muhammad, Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) di sela-sela peluncuran program KIP Plus (KIPP) di SMKN 2 Jogja, Rabu (19/10). ▶ ke hal 15



LUNCURKAN KIPP -- Dirjen Dikdasmen Kemendikbud, Hamid Muhammad memberikan KIPP kepada salah seorang siswi SMKN 2 Jogja dalam peluncuran program KIPP di sekolah setempat, Rabu (19/10).

YVESTA PUTU AYUHAN BERNAS

Lima Persen KIP

Sambungan dari halaman 9

Menurut Hamid, retur KIP dilakukan pada penerima yang dobel namanya, tidak ditemui data nama anak yang bersangkutan dan siswa yang mampu secara ekonomi namun mendapatkan kartu program tersebut. Selain itu peserta didik yang meninggal maupun yang pindah domisili dari satu kota ke kota lain.

Karena itu pemerintah melalui Kemendikbud menggulirkan program KIPP. Menggandeng sejumlah bank, penyaluran dana KIPP dilakukan melalui bank langsung ke rekening peserta didik.

Data siswa penerima KIPP berbasis sekolah agar tepat sasaran. Sekolah yang mengusulkan nama-nama siswa yang dianggap tepat menerima program tersebut.

"Targetnya sampai awal November nanti ada sekitar 17,9 juta siswa bisa menerima program ini. Saat ini dari 11 juta penerima, baru 4,5 juta siswa yang dananya sudah cair karena kapasitas bank yang relatif terbatas dan banyak anak-anak yang hidup di daerah terpencil yang cukup jauh dari bank," jelasnya.

Hamid menyebutkan, pemerintah menyediakan anggaran sekitar Rp 9,6 triliun untuk program ini. Dalam KIPP ini, siswa di tingkat SD menerima dana sebesar Rp 450.000 per

tahun, SMP sebesar Rp 750.000 per tahun, SMA/SMK sebesar Rp 1 juta per tahun.

KIPP merupakan KIP yang dibagikan dalam bentuk kartu ATM (smart card). Dengan demikian pelajar bisa langsung menarik dana di manapun.

DIY menjadi percontohan program KIPP ini. Sekolah bisa mencairkan dana tersebut secara kolektif melalui kepala sekolah.

"Jika uji coba di Yogyakarta ini berhasil maka tahun depan KIPP akan kita terapkan di 44 kabupaten/kota di Indonesia," ungkapnya.

Ditambahkan Hamid, program KIPP tersebut diharapkan juga menjadi pendidikan literasi perbankan bagi pelajar yang dikakukkan sejak dini. Bahk ke depan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) juga akan disalurkan melalui smart card tersebut.

"Dana BOS untuk sekolah di Indonesia tahun ini mencapai Rp 43 triliun untuk 231 ribu sekolah dan tahun depan dana BOS tersebut mencapai Rp 45 triliun, nantinya bisa menggunakan smart card," katanya.

Sementara Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY, Baskara Aji, mengungkapkan pihaknya siap mengawal penuh program KIPP tersebut. Apalagi program tersebut dimulai pertama kali di Kota

Pendidikan ini.

Pihaknya berharap kerja sama dengan dunia perbankan tidak hanya pada masalah teknik penyaluran dana KIPP. Namun juga kesadaran peserta didik dalam menyikapi program tersebut secara arif.

"Keberhasilan program ini berawal dari Yogyakarta, ini hal yang membanggakan dan harus kita kawal dengan sungguh-sungguh. Perlu ada evaluasi agar program KIPP ini bisa digunakan untuk seluruh siswa," ungkapnya.

Jumlah penerima KIPP di DIY pada tahun ini sebanyak 1.295 siswa. Disediakan 150 mesin Elektronik Data Capture (EDC) bagi siswa untuk menerima transaksi KIPP tersebut.

Direktur Program Elektronifikasi dan Keuangan Inklusif Bank Indonesia (BI), Pungki Purnomo menjelaskan, KIPP diharapkan dapat melatih pelajar dalam mengelola pengeluaran. Sebab tidak semua dana bantuan tersebut dapat dicairkan secara tunai karena menggunakan sistem penguncian rekening.

"Karena itu diharapkan siswa lebih bijaksana merencanakan pengeluarannya. Ini akan menjadi proses belajar siswa untuk bisa lebih bijaksana dalam merencanakan pengeluaran dengan baik," imbuhnya. (ptu)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 26 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005